

PENGEMBANGAN AGRIBISNIS MELALUI PONDOK PESANTREN



BIRO PERENCANAAN
DEPARTEMEN PERTANIAN RI
1994

631
BIR
P
14.875

Semburan Sat

PENGEMBANGAN AGRIBISNIS DI PONDOK PESANTREN



I. PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional Indonesia, pada hakikatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia yang untuk pencapaiannya menuntut pengarah dan pengerahan segenap potensi bangsa. Pondok pesantren sebagai pusat pendidikan agama merupakan salah satu komponen pembangunan khususnya di bidang pendidikan diluar jalur sekolah, memiliki potensi yang cukup besar. untuk menunjang pembangunan bangsa. Salah satunya adalah usaha untuk mengembangkan sumber daya dilingkungan Pondok Pesantren dalam program pertanian. Pembangunan pertanian yang pelaksanaannya terutama diarahkan untuk masyarakat pedesaan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha. Pondok Pesantren pada umumnya berlokasi di pedesaan memiliki tenaga kerja, lahan, sarana dan prasarana yang memungkinkan untuk usaha di bidang agribisnis disamping fungsi utamanya sebagai lembaga pendidikan dan dakwah. Untuk memanfaatkan potensi tersebut serta mempercepat pembangunan dibidang pertanian menuju perbaikan pendapatan masyarakat, perlu di kembangkan kegiatan Agribisnis.

Sasaran pengembangan agribisnis di Pondok Pesantren dan masyarakat sekitarnya agar mampu mengembangkan sumber penghasilan, perlu dilakukan melalui pengaturan waktu dan manajemen yang tepat dengan bantuan teknis dari pemerintah atau kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat, koperasi, swasta dan BUMN.

Komoditas yang akan dikembangkan di pondok pesantren disesuaikan dengan potensi sumberdaya dan agro ekologi setempat. Berbagai pilihan yang bisa dikembangkan yakni tanaman pangan (hortikultura, palawija, padi), peternakan, perikanan, perkebunan, termasuk agro industrinya.

Sejak dikeluarkannya Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Agama pada tanggal 4 Juni tahun 1991 tentang pengembangan Agribisnis di Pondok Pesantren, berarti sampai saat ini Pengembangan Agribisnis di Pondok Pesantren telah berusia 3 (tiga) tahun.



688
mei 14

650
1



Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, berbagai upaya telah dilakukan antara lain :

1. Pengembangan Sumberdaya Manusia
2. Kerjasama Swasta/BUMN
3. Bantuan Pemerintah melalui Paket-paket
4. Bimbingan dan Penyuluhan

Dalam pelaksanaannya, tidak terlepas dari kendala-kendala yang dihadapinya baik kendala yang berkaitan dengan struktur atau kendala yang berkaitan dengan usaha agribisnis itu sendiri.

Kiranya sangat diperlukan kerjasama yang terpadu antara berbagai pihak (Pemerintah, Pengusaha, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Pondok Pesantren), sehingga misi yang luhur ini bisa tercapai.

II. D A S A R

Pembangunan bidang Agribisnis bertujuan meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha. Untuk itu, dalam pelaksanaannya perlu lebih ditingkatkan bagi masyarakat pedesaan.

Pondok pesantren sebagai suatu lembaga pendidikan dan dakwah, pada umumnya berlokasi di pedesaan dan mempunyai sumberdaya potensial, seperti tenaga kerja, lahan, sarana dan prasarana yang memungkinkan untuk usaha di bidang Agribisnis. Disamping itu, Pondok Pesantren mempunyai pengaruh terhadap masyarakat di lingkungan pesantren dan alumni yang menyebar ke daerah dimana mereka berasal.

Acuan yang dipakai dalam merealisasikan Pengembangan Agribisnis di Pondok Pesantren adalah :

1. Keputusan bersama Menteri Pertanian dan Menteri Agama No. 346/KPTS/HK.050/6/91 dan No. 94 th 1991 tentang Pengembangan Agribisnis di Pondok Pesantren.
2. Kesepakatan Bersama Departemen Pertanian dan Departemen Agama No. HK.050/1995/B/X/1991 dan No. 110/E/1991 tentang Pedoman Tata Laksana Pengembangan Agribisnis di Pondok Pesantren.



3. Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 686/Kpts/KP.150/10/91 tentang Pembentukan Forum Pengembangan Agribisnis di Pondok Pesantren.
4. Memorandum kesepakatan antara Menteri Pertanian RI, Menteri Agama RI, Menteri Koperasi dan Pembinaan pengusaha Kecil RI dan PT. Bank Muamalat Indonesia dalam rangka Pengembangan Agribisnis di Pondok Pesantren Seluruh Indonesia No. 203 A tahun 93 dan No. 023/MOU/BMI/93.

III. T U J U A N

- a. Meningkatkan ketrampilan Warga Pondok Pesantren dan sekitarnya di bidang Agribisnis.
- b. Meningkatkan penyerapan alih teknologi bagi warga Pondok Pesantren dan masyarakat sekitarnya.
- c. Memperluas lapangan kerja dan berusaha bagi warga Pondok Pesantren dan masyarakat sekitarnya.
- d. Mengembangkan sumberdaya alam yang produktif yang dimiliki Pondok Pesantren untuk mendukung pembiayaan program Pendidikan di Pondok Pesantren.
- e. Meningkatkan pendapatan warga Pondok Pesantren.
- f. Meningkatkan kemampuan warga Pondok Pesantren agar dapat berswasembada di bidang ekonomi.

IV. S T R A T E G I

- a. Menciptakan peluang modal dasar Nasional untuk pembangunan pertanian.
- b. Menentukan sasaran-sasaran pembangunan pertanian secara bertahap khususnya yang mengacu pada pemerataan pendapatan. Sasaran tersebut ditentukan bersama antara Departemen Pertanian, perusahaan-perusahaan penyedia teknologi pertanian, perbankan dan para petani.



- c. Meningkatkan efektivitas organisasi pertanian, manajemen usaha dan pendanaannya.
- d. Mengadakan kerjasama dengan Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan lembaga keuangan lainnya.

V. PROGRAM

Melihat begitu kompleksnya permasalahan yang muncul dalam upaya menyebarkan SKB Menteri Pertanian dan Menteri Agama tentang Pengembangan Agribisnis di Pondok Pesantren, memerlukan penanganan yang terpadu, profesional dan menyeluruh. Program Pengembangan Agribisnis di Pondok Pesantren, dikelompokkan menjadi Program Pengembangan Sumberdaya manusia, Pengembangan Usaha dan pengembangan Permodalan.

A. Pengembangan Sumberdaya Manusia

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap para pelaku kegiatan Agribisnis di Pondok Pesantren baik Pembimbingnya (Departemen Pertanian dan Departemen Agama) ataupun Pengelolanya Agribisnis langsung dari masing-masing Pondok-Pondok Pesantren.



Penyelenggaraan Program ini dilakukan melalui : **Pendidikan dan Pelatihan**. Melalui program ini diharapkan “**ex trainers**” mampu menyebarkan pengetahuan, meningkatkan ketrampilan dan mengembangkan sikap yang diperlukan bagi para pelaksana pengembangan Agribisnis secara langsung di Pondok Pesantren.

Kegiatan ini dilaksanakan secara reguler baik di tingkat Nasional ataupun di wilayah-wilayah yang tersebar di 26 Propinsi. Begitu juga melalui program Pelatihan Agribisnis di Luar Negeri.

Bentuk-bentuk Pendidikan dan Pelatihan, dikembangkan melalui :

• **1. Pelatihan Kelas :**

Secara teoritis yang dipadukan dengan pengalaman-pengalaman lapang dari masing-masing peserta dipadukan sehingga disepakati hal-hal praktis untuk bisa diterapkan di lapangan.

Diskusi-diskusi dipandu serta mendapat arahan dari nara sumber dari kalangan Ilmuwan, Pemerintah ataupun praktisi di bidang Agribisnis.

Pelatihan dilakukan secara berjenjang, dalam bentuk paket-paket sehingga secara utuh kegiatan Agribisnis di Pondok Pesantren dapat dikelola dengan sebaik-baiknya menurut kaidah-kaidah usaha Agribisnis. Paket-paket pelatihan yang dikembangkan adalah :

1. Manajemen Agribisnis di Pondok Pesantren
2. Study Kelayakan Usaha Agribisnis di Pondok Pesantren
3. Manajemen Keuangan Usaha Agribisnis dan Perkreditan di Pondok Pesantren
4. Pengembangan Masyarakat (Community Development)

2. Pelatihan Lapang :

Secara langsung para peserta diajak untuk melihat dengan nyata kegiatan Agribisnis dilakukan.

Lokasi dan kegiatan Agribisnis yang dikunjungi, dipilih yang mendekati pada kondisi peserta pelatihan sehingga dengan kegiatan ini secara nyata peserta memiliki gambaran sebagai bandingan dengan kegiatan yang akan dan sudah dilakukan di masing-masing Pondok Pesantrennya.



Lokasi yang dipilih untuk dijadikan perbandingan adalah :

1. Pondok Pesantren yang telah dan berhasil melakukan kegiatan Agribisnis.
2. Balai Penelitian Pertanian Hortikultura.
3. Usaha Agribisnis yang dilakukan oleh pihak swasta.
4. Lembaga keuangan yang dilakukan secara Islami yaitu Baitul Mal Wat Tamwil (BMT).
5. Kegiatan Agribisnis yang dilakukan oleh petani-petani di Jepang.



B. Pengembangan Usaha

Sesuai dengan pengertian Agribisnis yaitu suatu sistem usaha tani mulai dari kegiatan pengadaan sarana, proses produksi, pengolahan hasil sampai dengan pemasaran komoditas pertanian, maka usaha yang akan dikembangkan dalam Pengembangan Agribisnis di Pondok Pesantren terbatas pada komoditi-komoditi pertanian yaitu Tanaman Pangan (hortikultura, palawija, padi), Peternakan, Perikanan, Perkebunan.

Beberapa kegiatan dalam pengembangan usaha ini adalah :

1. Persiapan Operasional

1.1. Penentuan Lokasi Pengembangan

- a). Lokasi pengembangan Agribisnis dapat meliputi seluruh Propinsi yang terdapat Pondok Pesantren (26 Propinsi kecuali Propinsi Timor Timor).
- b). Lahan usaha merupakan lahan yang dimiliki oleh pondok atau apabila memungkinkan dapat pula mengikut sertakan petani disekitarnya.
- c). Adanya sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang dapat dikembangkan. Sumberdaya alam yang utama adalah lahan yang cocok untuk usaha Agribisnis. Lahan yang mempunyai potensi namun belum banyak dimanfaatkan adalah lahan kering. Lahan tersebut umumnya terdapat di luar Jawa.

Disamping itu ada pula Pondok Pesantren yang berlokasi dekat dengan sumber air dan pantai sebagai sumberdaya alam yang lain. Sumberdaya manusia tentunya diharapkan dari warga Pondok Pesantren sendiri dan petani sekitarnya.

- d). Komoditas yang akan dikembangkan setiap Pondok Pesantren dimulai dengan kegiatan identifikasi dan penyusunan rencana usaha Agribisnis. Dari hasil identifikasi diketahui komoditas yang akan dikembangkan yang perlu didukung upayanya dengan bimbingan dan pelayanan dari aparat pemerintah. Prioritas komoditas yang dikembangkan, diarahkan kepada komoditas yang mempunyai nilai ekonomis tinggi dan peluang pasar.
- e). Perlu pula diperhatikan beberapa sarana pendukung yang ada kaitannya dengan pengembangan Agribisnis, antara lain :
 - 1). adanya jalan usaha tani
 - 2). tersedianya sarana produksi dan pemasaran
 - 3). adanya dukungan irigasi



1.2. Penyiapan Lahan

- a). Lahan yang digunakan umumnya adalah lahan kering yang belum diusahakan secara optimal.
- b). Pengolahan tanah, agar lahan siap untuk ditanami, termasuk pembuatan lobang tanam untuk tanaman tahunan seperti buah-buahan dan lain-lain dan pengolahan tanah bagi tanaman sela/intercropping.
- c). Disamping itu dari segi konservasi lahan juga diperhatikan untuk membuat terasering bagi lahan yang miring sesuai dengan teknik dan anjuran.

1.3. Pemilihan Komoditas

- a). Pola usaha tani yang akan dikembangkan dalam Agribisnis di Pondok Pesantren adalah pola usaha tani terpadu.
- b). Usaha tani terpadu akan melibatkan beberapa komoditas yaitu: Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan.





- c). Untuk komoditas Tanaman Pangan terdiri dari komoditas utama berupa hortikultura dan komoditas penunjang berupa padi dan palawija.
- d). Komoditas Perkebunan diarahkan pada komoditas yang bernilai ekonomi tinggi dan sesuai dengan agroekologi setempat.
- e). Komoditas Peternakan antara lain unggas, ternak kecil dan ternak besar.
- f). Usaha dibidang Perikanan sangat ditentukan adanya sumber air yang dapat berasal dari sungai, waduk, air tanah, air payau maupun air laut. Komoditas ikan yang dibudidayakan dapat berupa ikan air tawar seperti ikan mas, nilam, tawes dan lain-lainnya, ikan air payau seperti ikan bandeng serta udang, dan ikan air laut lainnya.

1.4. Alih Teknologi

Alih teknologi dalam pengembangan Agribisnis di Pondok Pesantren dilakukan melalui pelatihan terhadap penyuluh pertanian dan kursus bagi petugas Pondok Pesantren, santri dan petani sekitarnya.

2. Komponen Kegiatan

2.1. Tanaman Pangan

Kegiatan Agribisnis tanaman pangan di Pondok Pesantren diutamakan pada pengembangan buah-buahan yang telah dinilai dan layak untuk dikembangkan. Sebagai komoditas penunjang pada lahan yang sama dipilih yang berumur pendek seperti sayuran dan palawija.

Komponen kegiatan utama adalah :

- a. Penyiapan lahan termasuk **land clearing**, pengolahan tanah dan pembuatan lobang tanam.
- b. Penyediaan sarana produksi :
 - Pengadaan pupuk organik dan anorganik
 - Pengadaan bibit buah-buahan, sayuran, tanaman hias dan bunga-bunga serta palawija dan padi
 - Pengadaan peralatan kerja, dan
 - Irigasi, dan pembuatan jalan usaha tani





2.2. perkebunan

Paket yang akan diberikan adalah bibit dan sarana produksi lainnya.

2.3. Peternakan

Kegiatan pokok peternakan adalah penyediaan bantuan bibit ternak, bibit hijauan, makanan ternak dan lain-lain.

2.4. perikanan

Komponen kegiatan perikanan untuk pengembangan Agribisnis di Pondok Pesantren adalah :

- a. Bantuan paket teknologi terdiri dari pembuatan kolam ikan, dan keramba
- b. Pengadaan benih ikan, pakan, pupuk dan pestisida
- c. Pengadaan peralatan perikanan seperti jaring apung, kapal penangkap ikan dan lain-lain.

2.5. Agroindustri

Komponen kegiatan agroindustri berupa :

- a. Pengolahan hasil-hasil pertanian
- b. Sortasi, pengepakan dan perlakuan
- c. pengangkutan dan pemasaran

2.6. Menyediakan paket teknologi terapan dan data informasi pasar

3. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan pada setiap tahap kegiatan dan sedikitnya sekali dalam enam bulan.

C. Pengembangan permodalan

Program ini bertujuan meningkatkan dan mengembangkan kemampuan kewirausahaan Pondok Pesantren melalui penghimpunan dan pengelolaan dana. Disamping menjadi unit kegiatan Pondok Pesantren yang dapat memenuhi kebutuhan modal bagi masyarakat yang ada di sekitar Pondok Pesantren.



Untuk mewujudkan hal tersebut, ditempuh dengan cara menumbuh kembangkan pemupukan modal swadaya pada Pondok Pesantren, atau mengembangkan/membudayakan infaq dan shodaqoh.

Dalam upaya membiayai dan membantu kebutuhan modal usaha ini akan didirikan Baitul Mal Wat-Tamwil (BMT), suatu lembaga keuangan yang dengan modal skala kecilpun sudah bisa dilakukan dan bila ternyata modal yang dimiliki telah memadai, pengembangan permodalan ini akan mendirikan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Dalam pengelolaannya, lembaga keuangan ini (BMT, BPR) akan dikelola secara syari'ah.

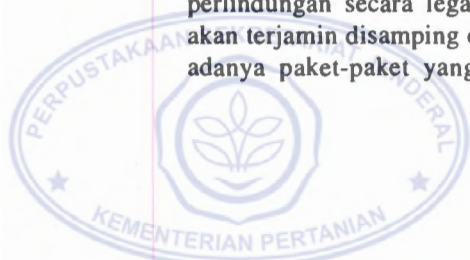
VI. HUBUNGAN KERJASAMA

Untuk mengefektifkan Pengembangan Agribisnis di Pondok Pesantren dalam menanggulangi permasalahan-permasalahan yang dihadapi, maka diperlukan jalinan hubungan kerja sama dengan berbagai pihak lembaga dan organisasi Pemerintah, dunia usaha baik di dalam negeri ataupun di luar negeri, dan juga hubungan kerjasama dengan LSM/LPSM, Lembaga-lembaga keuangan serta pihak lain yang searah dengan dasar dan tujuan Pondok Pesantren.

Hubungan kerjasama tersebut dilakukan secara bilateral dan multilateral atas dasar kesukarelaan, saling menghormati keberadaan masing-masing dan saling menguntungkan.

Pelaksanaan hubungan kerjasama ini, dalam rangka mencapai kemandirian kegiatan usaha agribisnis di Pondok Pesantren seperti tertuang dalam tujuan yaitu meningkatkan ketrampilan warga Pondok Pesantren di bidang Agribisnis, meningkatkan penyerapan alih teknologi bagi warga Pondok Pesantren, memperluas lapangan kerja dan lapangan berusaha bagi warga Pondok Pesantren, mengembangkan sumberdaya alam yang produktif yang dimiliki Pondok Pesantren, meningkatkan kemampuan warga Pondok Pesantren agar dapat berswasembada di bidang ekonomi, disamping fungsi utama Pondok Pesantren sebagai lembaga pendidikan agama Islam.

Hubungan dengan lembaga Pemerintah dimaksudkan sebagai pendorong dan perlindungan secara legal sehingga tingkat keamanan dan kelancaran berusaha akan terjamin disamping dukungan fasilitas yang bisa memperlancar usaha seperti adanya paket-paket yang erat kaitannya dengan Pengembangan Agribisnis di





Pondok Pesantren. Departemen Pertanian dan Departemen Agama sebagai payung utama, kemudian didukung oleh Departemen Perindustrian, Departemen Koperasi, Departemen Perdagangan. Hubungan kerjasama ini, dilakukan ditingkat Pusat sampai Daerah.

Hubungan dengan dunia usaha, dimaksudkan bahwa pengusaha-pengusaha lain akan dijadikan partner, baik sebagai suplayer atau pemasar dari produk yang dihasilkan oleh Pondok Pesantren.

Hubungan dengan lembaga keuangan, dimaksudkan untuk membantu usaha Pondok Pesantren dalam hal pendanaan. Sehingga kegiatan usaha bisa dilakukan secara maksimal. Beberapa bank yang akan menjadi partner adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Bank Pemerintah.

Hubungan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pondok Pesantren memanfaatkan Keputusan Menteri Keuangan No. 316/KMK.016/1994 yang merupakan peninjauan dari Keputusan Menteri Keuangan No. 1232/KMK.013/1989, No. 306/KMK.013/1991 dan No. 368/KMK.013/1991. Tentang Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi melalui pemanfaatan dana dari bagian laba Badan Usaha Milik Negara. Sampai saat ini telah ada BUMN (PT. Telkom) yang membuat MOU dengan Departemen Agama pada tanggal 1 Oktober 1994.



Hubungan kerja dengan LSM/LPSM dimaksudkan, sebagai mitra kerja, terutama dalam hal pembinaan pada masyarakat yang ada disekitar Pondok Pesantren. Pada saat ini LSM/LPSM yang telah aktif dalam berbagai kegiatan adalah Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya (PPMA) yang berkantor di Jalan Kalibata Timur No. 31 A Pejaten, Pasar Minggu – Jakarta Selatan, 12510
Telepon : 7984918

VII. ORGANISASI

Susunan organisasi dalam mensukseskan SKB Menteri Agama dan Menteri Pertanian ini, sesuai dengan Kesepakatan Bersama No. HK.050/1995/B/X/1991 dan No. 110/E/1991 terdiri organisasi pada tingkat Pusat dan tingkat Propinsi.

1. Tim Pengarah

Ketua Merangkap Anggota : Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian

Ketua I Merangkap Anggota : Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama

Ketua II Merangkap Anggota : Kepala Badan Diklat Pertanian Departemen Pertanian

Sekretaris I : Kepala Biro Perencanaan, Departemen Pertanian

Sekretaris II : Direktur Bina Produksi Hortikultura

Anggota : 1. Sekretaris Jenderal Departemen Agama
2. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, Departemen Agama
3. Direktur Jenderal Pertanian Tanaman Pangan
4. Direktur Jenderal Perkebunan
5. Direktur Jenderal Peternakan
6. Direktur Jenderal Perikanan
7. Sekretaris Badan Pengendali Bimas
8. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian



2. Tim Teknis

Ketua Merangkap Anggota : Kepala Biro Perencanaan, Departemen Pertanian

Ketua I Merangkap Anggota : Direktur Pembinaan Perguruan Agama Islam

Ketua II Merangkap Anggota : Direktur Bina Produksi Hortikultura

Sekretaris : Kepala Bagian Penyusunan Program dan Proyek, Biro Perencanaan Departemen Pertanian



- Sekretaris I** : Pymt. Kepala Sub Direktorat Pembinaan Pondok Pesantren, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama
- Sekretaris II** : Kepala Sub Direktorat Pendayagunaan Lahan, Direktur Bina Produksi Hortikultura
- Anggota** :
1. Direktur Bina Program Tanaman Pangan
 2. Direktur Bina Usaha Tani dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan
 3. Direktur Bina Rehabilitasi dan Pengembangan Lahan
 4. Direktur Bina Program Perkebunan
 5. Direktur Bina Program Perikanan
 6. Direktur Bina Program Peternakan
 7. Direktur Bina Produksi Peternakan
 8. Kepala Biro Tata Usaha, Departemen Pertanian
 9. Kepala Biro Perencanaan, Badan Pengendali Bimas
 10. Kepala Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat, Badan penelitian dan Pengembangan Pertanian
 11. Kepala Pusat Penyiapan Program Penelitian Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
 12. Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai, badan Pendidikan dan Latihan Pertanian
 13. Kepala Biro Organisasi, Departemen Agama
 14. Kepala Biro Perencanaan, Departemen Agama
 15. Kepala Biro Keuangan, Departemen Agama
 16. Direktur Urusan Agama Islam Departemen Agama



Pembantu Umum

- :
1. Kepala Sub Bagian Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Perkebunan Biro Perencanaan, Departemen Pertanian
 2. Kepala Bagian Penyusunan Rencana Badan Pendidikan dan Latihan, Departemen Pertanian
 3. Kepala Seksi Lahan Kering pada Direktorat Bina Produksi Hortikultura
 4. Kepala Sub Direktorat Bantuan Program Direktorat Bina Program Perkebunan
 5. Kepala Sub Direktorat Mutu Ternak, Direktur Bina Produksi Peternakan
 6. Kepala Sub Direktorat Identifikasi dan Perumusan, Direktorat Bina program perikanan
 7. Kepala Bagian Anggaran Rutin Pada Biro Perencanaan Departemen Agama



Departemen Agama

8. Kepala Bagian Penyusunan program Sekretaris Direktorat Jendral Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama
9. Kepala Sub Direktorat Pembinaan Kemahasiswaan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama
10. Kepala Bagian Hukum Biro Hukum dan Perundang-undangan, Depag
11. Kepala Seksi II Sub Direktorat Pembinaan Pondok Pesantren, Depag
12. Kepala Seksi III Sub Direktorat Pembinaan Pondok Pesantren Depag
13. Kepala Bagian Tata Usaha Direktorat Pembinaan Perguruan Agama Islam Departemen Agama
14. Staf Direktorat Pembinaan Perguruan Agama Islam Departemen Agama



3. Tim Pembina di Tingkat Propinsi

Ketua Merangkap Anggota	: Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Ketua Harian Merangkap Anggota	: Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian
Wakil Ketua Harian merangkap Anggota	: Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Sekretaris Merangkap Anggota	: Kepala Bidang Perguruan Agama Islam/ Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama
Anggota	: – Terdiri atas Dinas-Dinas Lingkup Pertanian Tingkat I – Kantor Wilayah Departemen Agama

VIII. PERKEMBANGAN KEGIATAN

Semenjak lahirnya SKB Menteri Pertanian dan Menteri Agama pada tanggal 4 Juni 1991, telah banyak kegiatan-kegiatan baik persiapan, manajemen dan operasional di Pondok Pesantren. Kegiatan-kegiatan nyata, dapat digolongkan sebagai berikut :

1. Pengembangan Sumberdaya Manusia

a. Pelatihan di Pusat (Jakarta)

Ditingkat Pusat telah dilaksanakan Pelatihan sebanyak 4 angkatan dari 26 Propinsi.



NO.	PELATIHAN	WAKTU	PESERTA		
			INSTANSI	PP	TOTAL
1.	TOT Manajemen Agribisnis di Pondok Pesantren	6 – 15 Juli 1992	65	21	86
2.	TOT Manajemen Agribisnis di Pondok Pesantren	16 – 17 Juli 1992	52	14	66
3.	Manajemen Usaha dan Studi Kelayakan	2 – 12 Juli 1993	57	47	104
4.	Manajemen Keuangan dan Perkreditan (BMT)	28 Agustus – 7 Sept. 1994	31	28	59
	TOTAL	-	205	110	315

b. Pelatihan di Tingkat Wilayah

Pada tingkat wilayah/Propinsi, pengembangan sumberdaya manusia telah dilaksanakan melalui pelatihan-pelatihan. Selama tahun 1992/1993 s/d 1993/1994 telah dilaksanakan masing-masing 2 kali. Jenis pelatihan adalah manajemen Agribisnis dan dilengkapi dengan pelatihan teknis budidaya. Peserta pelatihan terdiri dari utusan Pondok Pesantren sebagai pengelola langsung dan utusan dari Dinas Instansi yang akan membina kegiatan Agribisnis di Pondok Pesantren. Rincian Propinsi yang melakukan pelatihan adalah :

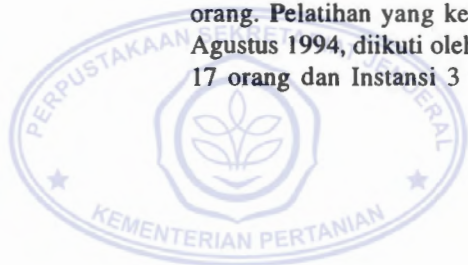


**PROPINSI-PROPINSI YANG MELAKUKAN
PELATIHAN MANAJEMEN AGRIBISNIS**

NO	PROPINSI	PESERTA(Orang)		
		1992/1993	1993/1994	TOTAL
1.	DI Aceh	30	30	60
2.	Sumatera Utara	30	30	60
3.	Sumatera Barat	30	30	60
4.	R i a u	30	30	60
5.	J a m b i	30	30	60
6.	Sumatera Selatan	30	30	60
7.	Bengkulu	30	30	60
8.	Lampung	30	30	60
9.	DKI Jakarta	30	30	60
10.	Jawa Barat	30	30	60
11.	DI Yogyakarta	30	30	60
12.	Jawa Timur	30	30	60
13.	Jawa Tengah	30	30	60
14.	B a l i	30	30	60
15.	N T B	30	30	60
16.	N T T	30	30	60
17.	Kalimantan Barat	30	30	60
18.	Kalimantan Tengah	30	30	60
19.	Kalimantan Selatan	30	30	60
20.	Kalimantan Timur	30	30	60
21.	Sulawesi Utara	30	30	60
22.	Sulawesi Tengah	30	30	60
23.	Sulawesi Tenggara	30	30	60
24.	Sulawesi Selatan	30	30	60
25.	Maluku	30	30	60
26.	Irian Jaya	30	30	60
		780	780	1.560

c. Pelatihan Agribisnis di Jepang

Pelatihan dilakukan dari tanggal 12 Juli s/d 1 Setember 1993, diikuti oleh 19 orang terdiri dari Pondok Pesantren 15 orang dan Instansi 4 orang. Pelatihan yang ke dua dilaksanakan pada tanggal 19 Juni s/d 12 Agustus 1994, diikuti oleh 20 orang terdiri dari peserta Pondok Pesantren 17 orang dan Instansi 3 orang.



2. Pengembangan Usaha

Kegiatan usaha yang dilakukan di Pondok Pesantren ada yang swadaya dan bantuan dari pihak lain termasuk paket-paket yang diberikan oleh pemerintah (Deptan). Pondok Pesantren yang mendapat bantuan paket dari Departemen Pertanian untuk tahun anggaran 1992/1993 dan 1993/1994 adalah sebagai berikut:

PONDOK PESANTREN YANG MENDAPAT PAKET AGRIBISNIS TAHUN 1992/1993

NO.	PROPINSI	TANAMAN PANGAN	PETER- NAKAN	PER- IKANAN	PERKE- BUNAN
1.	DI Aceh	1	-	1	-
2.	Sumatera Utara	1	-	3	2
3.	Sumatera Barat	1	2	1	4
4.	R i a u	1	-	-	-
5.	J a m b i	1	1	1	-
6.	Sumatera Selatan	1	-	1	1
7.	Bengkulu	1	-	-	-
8.	Lampung	3	1	-	1
9.	DKI Jakarta	-	-	-	-
10.	Jawa Barat	1	3	3	2
11.	DI Yogyakarta	1	-	-	-
12.	Jawa Timur	1	-	1	1
13.	Jawa Tengah	1	7	3	-
14.	B a l i	-	-	-	-
15.	N T B	3	1	4	-
16.	N T T	-	-	-	1
17.	Kalimantan Barat	3	-	-	-
18.	Kalimantan Tengah	-	-	1	-
19.	Kalimantan Selatan	2	2	1	1
20.	Kalimantan Timur	1	2	2	-
21.	Sulawesi Utara	1	1	-	-
22.	Sulawesi Tengah	2	-	-	-
23.	Sulawesi Tenggara	1	-	1	-
24.	Sulawesi Selatan	2	2	-	-
25.	Maluku	-	1	-	-
26.	Irian Jaya	1	-	-	-
	TOTAL	29	23	23	13



**PONDOK PESANTREN
YANG MENDAPAT PAKET AGRIBISNIS
TAHUN 1993/1994**

NO.	PROPINSI	TANAMAN PANGAN	PETER- NAKAN	PER- IKANAN	PERKE- BUNAN
1.	DI Aceh	3	2	—	5
2.	Sumatera Utara	4	—	—	4
3.	Sumatera Barat	4	5	3	12
4.	R i a u	4	14	5	23
5.	J a m b i	5	5	5	15
6.	Sumatera Selatan	7	6	7	20
7.	Bengkulu	2	—	—	2
8.	Lampung	7	8	6	21
9.	DKI Jakarta	—	—	—	—
10.	Jawa Barat	8	9	10	27
11.	DI Yogyakarta	—	1	4	12
12.	Jawa Timur	7	7	7	21
13.	Jawa Tengah	2	8	2	12
14.	B a l i	7	7	6	20
15.	N T B	1	2	2	5
16.	N T T	—	—	—	—
17.	Kalimantan Barat	1	—	—	1
18.	Kalimantan Tengah	2	1	3	6
19.	Kalimantan Selatan	3	1	2	6
20.	Kalimantan Timur	1	2	3	6
21.	Sulawesi Utara	—	—	—	—
22.	Sulawesi Tengah	8	4	5	17
23.	Sulawesi Tenggara	2	3	3	8
24.	Sulawesi Selatan	10	10	6	26
25.	Maluku	2	4	1	7
26.	Irian Jaya	—	—	—	—
	TOTAL	90	99	80	269



3. Forum Komunikasi Agribisnis Pondok Pesantren Indonesia (FORKAPPI)

Dalam rangka mempercepat perkembangan Agribisnis di Pondok Pesantren sangat diperlukan Forum Komunikasi Agribisnis Antar Pondok Pesantren. Forum ini akan membantu/menjembatani hubungan Pondok Pesantren dengan Pemerintah dan berbagai pihak lainnya dalam mengembangkan Agribisnis. Disamping itu, forum ini bertindak juga sebagai sarana konsultasi, terutama dalam mengatasi berbagai masalah yang dihadapi dalam mengembangkan Agribisnis baik sebagai salah satu usaha yang menunjang keuangan Pondok Pesantren maupun dalam membina masyarakat disekitarnya.

Forum komunikasi Agribisnis Pondok Pesantren Indonesia (FORKAPPI) merupakan lembaga informasi dan konsultasi. Karena itu, lembaga ini bersifat independen dan tidak berpolitik praktis.

Adapun tujuan dibentuknya FORKAPPI adalah sebagai berikut :

- a. Menjalin kerjasama dan silaturahmi antar Pondok Pesantren, Pemerintah dan masyarakat sekitar Pondok Pesantren dalam mengembangkan Agribisnis.
- b. Terbentuknya arus komunikasi yang cepat dan tepat antar Pondok Pesantren yang mengembangkan Agribisnis.
- c. Membantu Pondok Pesantren yang sudah mengembangkan Agribisnis untuk bekerjasama dengan pihak-pihak yang terkait (Industri, BUMN, Pemerintah, dll), baik untuk pencairan atau jalur tata niaga pemasaran dll.
- d. Lahirnya Agribisnis di Pondok Pesantren yang diridloi Allah SWT.

Program kerja untuk mencapai tujuan tersebut adalah :

1. Buletin Komunikasi Pondok Pesantren (terbit setiap empat bulan).
2. Surat menyurat dalam rangka penyampaian :
 - Kebijakan terkait dengan mengembangkan Agribisnis Pondok Pesantren.
 - Penyampaian rumusan-rumusan dan panduan-panduan dalam pelaksanaan Agribisnis.



3. Mengupayakan dan mencari mitra kerja Pondok Pesantren dalam mengembangkan Agribisnis dengan pihak swasta dan pemerintah.
4. Mengupayakan pemecahan masalah yang dihadapi oleh Pondok Pesantren dalam mengembangkan Agribisnis.
5. Mengadakan pertemuan secara berkala dalam rangka menjalin hubungan silaturahmi antar Pondok Pesantren dan merumuskan kebijakan tentang pengembangan Agribisnis Pondok Pesantren dan pengembangan di masyarakat sebagai masukan kepada pemerintah (Departemen Pertanian dan Departemen Agama).
6. Mengkaji dan merumuskan langkah-langkah operasional dalam mempercepat aplikasi Agribisnis Pondok Pesantren dan pengembangannya di masyarakat.

PERSONALIA PENGURUS FORKAPPI

- I. Pelindung : – Bapak Menteri Pertanian RI
– Bapak Menteri Agama RI
- II. Penasehat/Pembina : – Bapak Kepala Biro Perencanaan
Departemen Pertanian RI
– Bapak Direktur Pembinaan Perguruan
Agama Islam Departemen Agama RI
- III. Pelaksanaan Harian :
- Ketua : Drs. A. Faqih Basyar
PP. Manbail Putih Beji Jenu Tuban Jatim
- Wakil Ketua : Drs. Muh. Santosa Yusuf
Kanwil Departemen Agama Propinsi Lampung
- Wakil Ketua : Ir. Ishak Utama
Kanwil Departemen Pertanian Sulawesi Utara
- Sekretaris : Ir. Wawan Ridwan
Kanwil Departemen Pertanian DKI Jakarta



Wakil Sekretaris : Syaiful Hidayatullah
PP. AL-Ikhsan Purwokerto Jawa Tengah

Bendahara : H. Muhammad Sholeh, SE
PP. Al-Hasan Karawang Jawa Barat

IV. Koordinator Propinsi/Pulau :

1. DKI Jakarta : M. Luthfi Purnomo
PP. Assyifa' Cilandak Timur Pasar Minggu
Jakarta Selatan
2. Jawa : H. Hazim Hadari, SH
PP. Nurul Jadid Paiton Probolinggo Jatim
3. Bali : Drs. Abu Siri
PP. Nurul Iman Pegametan Sumberkima
Gerokgak Buleleng Bali
4. Sumatera : Drs. M. Ikromi Saputra AR
PP. Darul Arafah Tanjungsari Medan
Sumatera Utara
5. Kalimantan : Drs. H.A. Munif H. Usman
PP. Miftahul Huda Sungai Ambangah
Sungai Raya Pontianak Kalimantan Barat
6. Sulawesi : H.M. Alwi D. Paranru, LC.
PP. Daral Da'wah Wal Irsyad (DDI)
Mangkoso Barru Sulawesi Selatan
7. NTB : Ir. A. Wus'an Al Qusyairi
PP. Maroqitta'limat Mamben Aikmel
Lotim NTB
8. NTT : Mansyur Keneng, S.Pd.
PP. Hidayatullah Cabang Kupang NTT



9. Maluku : Umar Attamimi, SH
PP. Darul Arqam Hila Ambon
10. Irian Jaya : H. Arsyad B.
PP. Darul Istiqomah Cabang Sorong Irja

V. Pembantu Utama :

1. K.H. Husni Hinwari
PP. Al Hasan Karawang Jawa Barat
2. Abdul Wahib
PP. Maslakul Huda Kajen Pati Jawa Tengah
3. H. Ir. Lucky Rulyaman
Kanwil Departemen Pertanian Jawa Barat

Pembantu Umum : Seluruh Peserta TOT Angkatan I, II, III & IV.

Sekretariat FORKAPPI :

Jl. Masjid No. 500 Telp. (0322) 41736
Baureno, Bonjonegoro, Jawa Timur 62192

4. Kerjasama

Pada tanggal 13 Agustus 1994, telah dilaksanakan perjanjian kerjasama tiga pihak antara Koperasi Pondok Pesantren Darul Muhsinin–Sumatera Utara, PT. Perkebunan III, IV, V dan PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI).

Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk mewujudkan kualitas sumberdaya manusia yang maju dan mandiri serta meningkatkan kesejahteraan lahir bathin dari warga Pondok Pesantren dan masyarakat sekitarnya.

Ruang lingkup kerjasama yaitu dalam kegiatan usaha budidaya kelapa sawit yang akan ditanam di tanah yang dimiliki oleh Pondok Pesantren Darul Muhsinin seluas 20 – 100 Ha dengan pola bagi hasil. Adapun biaya operasional budidaya kelapa sawit dibiayai dari dana BMI dengan jaminan dari PT. Perkebunan (PTP) III, IV dan V. Kegiatan usaha Agribisnis kelapa sawit dibina dan dibimbing oleh PT. Perkebunan.



BIRO PERENCANAAN DEPARTEMEN PERTANIAN

Jl. Harsono RM No. 3 Pasar Minggu
Jakarta Selatan 12550
Gedung A Lantai IV Kamar 406
Tlp. 7804396, 7804156 Fax. 7890203

**SUBDIT PEMBINAAN PONDOK PESANTREN DAN
MADRASAH DINIYAH DIREKTORAT PEMBINAAN
PERGURUAN AGAMA ISLAM
DEPARTEMEN AGAMA**

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3 - 4
Lantai VII Kamar B.702
Tlp. 361523, 361654 Pesawat : 291

